

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di 6 provinsi pulau Jawa, serta mengetahui respon pembiayaan bermasalah terhadap gejala makroekonomi. Gejala makroekonomi diwakili oleh inflasi, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi. Di bawah ini kesimpulan yang bisa disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah pulau Jawa menunjukkan bahwa tidak semua NPF di 6 provinsi pulau Jawa merespon positif terhadap guncangan inflasi, produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi. Seperti inflasi, hanya provinsi Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta saja yang merespon positif. Kemudian guncangan produk domestik bruto juga hanya direspon positif oleh provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk guncangan indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi hanya satu provinsi saja yang merespon negatif yaitu provinsi DI Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua guncangan inflasi, produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi di masing-masing provinsi memberikan dampak yang buruk

terhadap NPF, selama ke empat variabel tersebut masih dapat dikendalikan oleh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah maka tidak akan berpengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah

2. Hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada NPF menunjukkan bahwa semua NPF provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur lebih cepat stabil terhadap guncangan variabel makroekonomi.
3. Hasil *Variance Decomposition* pada NPF Banten menjelaskan bahwa kontribusi utama pada perilaku NPF dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, kemudian diikuti oleh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan terakhir adalah inflasi. Provinsi DKI Jakarta kontribusi utamanya adalah inflasi, kemudian indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto. Wilayah Jawa Barat kontribusi utamanya adalah indeks pembangunan manusia, inflasi, upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto. Kemudian provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur memiliki persamaan pada kontribusi utamanya terhadap NPF, yaitu inflasi. Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan produk regional bruto, DI Yogyakarta dan Jawa Timur indeks pembangunan manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah sebaiknya memperbanyak komposisi pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan usaha produktif. Sehingga bila terjadi gejala makroekonomi, dampak yang diterima oleh keduanya dapat diminimalisir karena dana yang disalurkan dapat terus berputar.
2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya mengkaji lebih dalam terkait dengan efektifitas kebijakan yang diambil, khususnya pada pengendalian tingkat harga, sehingga kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas hanya sebatas pada kondisi makro ekonomi, sedangkan berdasarkan teori yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tidak terbatas pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel kondisi keuangan bank.